



DIK RUTIN

LAPORAN PENELITIAN
PERAN EKONOMI PEDAGANG KAKI LIMA WANITA DI
DALAM RUMAH TANGGA

Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Perempuan di Simpanglima
Semarang

Oleh

Drs.Suyanto

Drs.M.Hermintoyo

Dra.Sri Puji Astuti

Dibeyai oleh Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia,
Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional
Tahun Anggaran 2002

FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2002

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN DIK RUTIN TAHUN 2002

1. a. Judul Penelitian : Peran Ekonomi Pedagang Kaki Lima Wanita di dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Perempuan di Simpanglima Semarang
- b. Bidang Ilmu : Ilmu Sosial
- c. Kategori Penelitian : Pembangunan
2. Ketua Peneliti
- a. Nama dan Gelar : Drs.Suyanto
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Pangkat/Gol/NIP : Penata Muda / III-A/132086674
- d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- e. Jabatan Struktural : -
- f. Fakultas/Jurusan : Sastra/Sastra Indonesia
- g. Universitas : Universitas Diponegoro
- h. Pusat Penelitian : Universitas Diponegoro
3. Jumlah Anggota Peneliti : 2 (dua) orang
- Nama Anggota Peneliti : Drs.M.Hermintoyo
Dra. Sri Puji Astuti
4. Lokasi Penelitian : Simpanglima Semarang-
5. Kerjasama dengan Insitusi Lain: -
6. Lama Penelitian : 6 (enam) Bulan
7. Biaya yang diperlukan :
- a.Sumber DIK Rutin Th 2002 : Rp3.000.000,-
- b.Sumber Lain : -
- c.Jumlah : Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah)

Semarang, 21 Oktober 2002

Ketua Peneliti,

Dra. Suyanto

NIP 132086674



RINGKASAN

Kenyataan menunjukkan bahwa pedagang kaki lima sebagai bagian dari komitas sektor informal memegang peranan penting dalam ekonomi Indonesia, baik dalam skala makro maupun mikro (rumah tangga). Peran penting itu dibuktikan oleh kemampuannya yang fleksibel dalam menyerap tenaga kerja yang tidak terakomodasi dalam sektor formal yang sebagian terbesar adalah berpendidikan rendah, modal kecil, dan tidak mempunyai akses informasi. Daya serap sektor ini dari waktu- ke waktu selalu meningkat, dan pada tahun 1999 mampu menyerap 61,99 % angkatan kerja dari seluruh angkatan kerja di Indonesia. Sedangkan untuk skala Jawa Tengah dari tahun 1971, 1980, 1990, 1995, 1996, 1997, 1998, hingga 1999 tenaga kerja yang terserap ke sektor informal masing-masing adalah: 62,19; 66,75; 62,51; 61,51; 62,60 62,65; 65,64; dan 64,05.

Penelitian ini melibatkan 12 pedagang kaki lima perempuan sebagai informan yang meliputi pedagang makanan 75 persen dan nonmakanan 25 persen. Adapun pendidikan informan berdistribusi antara tidak tamat SD hingga tamat SLTA, masing-masing tidak tamat SD 25 persen, SD 17 persen, SLTP 25 persen, dan SLTA 33 persen. Daerah asal mereka adalah Semarang 42 persen, luar Semarang tetapi masih lingkup Jawa Tengah 42 persen, Jakarta dan Padang masing-masing delapan persen. Sedangkan pekerjaan mereka sebelum menjadi PKLW di Simpanglima adalah petani delapan persen, ibu rumah tangga 42 persen, dan berdagang 50 persen.

Pendapatan sebagai PKLW tiap bulan berkisar antara Rp 250.000,00 hingga 2,5 juta rupiah. Secara umum pendapatan mereka antara Rp501.000,00 – Rp750.000,00 yaitu sebesar 50 persen, sedangkan yang berpendapatan Rp751.000,00 – satu juta rupiah berbanding sama dengan mereka yang berpendapatan Rp250.000,00 – Rp500.000,00 yaitu sebesar 17 persen. Pendapatan mereka cukup signifikan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, mulai dari pembeayaan pendidikan, kebutuhan sehari-hari, kesehatan, pemeblian kekayaan lain seperti kekayaan yang bergerak: motor roda dua, perabot rumah tangga, perhiasan, barang elektronik dan kekayaan tidak bergerak yang berupa tanah dan rumah.

KATA PENGANTAR

Walupun pedagang kaki lima perempuan sebagai bagian dari sektor informal berperan penting dalam perekonomian Indonesia, namun belum dapat meniadakan pandangan bahwa mereka sebagai pengganggu ketertiban, keindahan, dan kebersihan kota. Di satu sisi mereka sebagai *bumper* ekonomi Indonesia, di sisi lain di pandang sebaga “makhluk” pengganggu. Sikap dualisme pemerintah inilah yang menggelisahkan peneliti untuk mencoba melihat peran mikro mereka dalam rumah tangga.

Tim peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Sastra yang memberi izin kepada kami untuk melakukan penelitian masalah ini. Selain itu, peneliti juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Lembaga Penelitian Undip dan Rektor atas dukungan dana yang diberikan untuk penelitian ini. Tanpa dukungan dana itu, mustahil penelitian ini hadir di hadapan Anda.

Penelitian ini sudah barang tentu tidak luput dari kekurangan, baik dari segi substansi maupun metodologi. Hal ini disebabkan oleh waktu yang disediakan sangat terbatas yaitu dua bulan, September hingga Oktober 2002, di samping penguasaan teori yang mungkin belum maksimal. Namun demikian, segala kekurangan adalah tanggung jawab Tim Peneliti. Oleh karena itu, kritik dan saran demi perbaikan laporan ini, kami harapkan.

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Sektor Informal: Pedang Kaki Lima.....	6
2.2 Peran Perempuan dalam Rumah Tangga.....	10
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	15
3.1 Tujuan Penelitian.....	15
3.2 Manfaat Penelitian.....	15
BAB IV METODE PENELITIAN.....	17
4.1.Deskripsi Wilayah.....	17
4.1.1 Kondisi Fisik.....	17
4.1.2. Kota Lama	19
4.1.3.Kota Atas dan Kota Bawah	22
4.1.4. Simpanglima: Gambaran Pusat Kota Semarang	23
4.1.5 Pemekaran Kota	26
4.1.6 Sepintas Sejarah Kota Semarang	28
1.1.7 Penduduk dan Ketenagakerjaan	30

4.2 Pemilihan Informan	36
4.3 Pengumpulan Data	37
4.3.1 Data Sekunder	37
4.3.2 Data Primer	37
4.3.2.1 Metode wawancara Mendalam	37
4.3.2.2 Observasi	38
4.4 Analisis Data	38
BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL	39
5.1 Karakteristik Informan	39
5.1.1 Jenis Dagangan.....	39
5.1.2 Umur Informan	40
5.1.3 Pendidikan	41
5.1.4 Jumlah Anak	42
5.1.5 Daerah Asal	42
5.2 Kontribusi dalam Ekonomi Rumah Tangga	45
5.2.1 Kekayaan tidak Bergerak	45
5.2.2 Kekayaan Bergerak	47
5.2.3 Beaya Sosial dan Kebutuhan Sehari-hari	48
5.3 Sisi-sisi Lain berdagang di Simpanglima	50
5.4 Pergeseran Peran Perempuan dalam Rumah Tangga	51

BAB VI PENUTUP 57
DAFTAR PUSTAKA 60

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 1999	31
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Semarang Menurut Mata Pencaharian Tahun 1999	33
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kota Semarang Menurut Pendidikan Tahun 1999	34
Tabel 4.4 Jumlah Angkatan Kerja Kota Semarang Menurut Kelompok Umur Tahun 1999	35
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Kota Semarang yang Tidak Bekerja Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 1999	36
Tabel 5.1 Karakteristik 12 Pedagang Kaki Lima Perempuan Simpanglima ..	43

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia disinyalir sebagai negara yang mempunyai tingkat urbanisasi tertinggi di dunia setelah negara-negara di kawasan Amerika Latin. Hal ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi negara yang timpang, antara ekonomi pedesaan dan perkotaan selain masalah kemiskinan dan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Bahkan penelitian Josef Gugler (1996) di negara-negara berkembang menunjukkan secara demonstratif bahwa kehidupan yang paling susah di kota ternyata masih lebih enak dari kehidupan di desa. Sebenarnya, jumlah penduduk yang besar tidak akan menjadi masalah, bahkan dapat menjadi daya dukung ekonomi yang potensial, selama diimbangi tersedianya lapangan kerja bagi mereka. Namun, kenyataan bagi Indonesia berbicara lain.

Hal ini diperparah dengan adanya krisis ekonomi yang disertai krisis sosial politik yang hingga kini belum membaik, justru sebaliknya berbagai gejala bermunculan di berbagai tempat, baik gejala yang bersifat sosial maupun politik. Sedangkan dilihat dari perspektif jender, terjadinya urbanisasi yang besar lebih disebabkan oleh modernisasi yang hanya menyentuh kaum laki-laki, sementara pada saat yang bersamaan meminggirkan kaum perempuan (Boserup, 1990). Modernisasi pada bidang pertanian misalnya, merupakan kasus nyata suatu bentuk proses marginalisasi perempuan. Berbagai teknologi bidang pertanian hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Alat pemetik padi misalnya, mengakibatkan perempuan tidak lagi

terlibat dalam pemetikan padi. Demikian juga adanya mesin penanam padi menjadikan perempuan tidak lagi mengerjakan penanaman padi.

Oleh karena itu, semenjak tahun 1970-an PBB merespon permasalahan ini baik secara praktis yang berupa langkah aksi maupun teoritis yang berupa studi pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini diawali oleh Amerika Serikat yang pada tahun 1973 mencanangkan "*The Percy Amendment to the 1973 Foreign Assistance Act*" yang mensyaratkan perlunya melibatkan perempuan dalam proses pembangunan bagi negara Dunia Ketiga yang mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. Langkah tersebut bahkan pada tahun 1974 diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai paradigma pembangunan global dengan dicanangkannya tahun 1976-1985 sebagai "*International Decade of Women*". Hal inilah yang dikenal sebagai konsep *Women in Development* (WID) yang selanjutnya disusul konsep antitesisnya berupa *woman and development* (WAD) dan terakhir muncul sintesis *gender and development* (GAD).

Sejak saat itu Biro WID mulai dibuka pada USAID dan mulailah berbagai pengetahuan, kebijakan, dan sumber informasi diekspor dan diciptakan untuk mempengaruhi jutaan nasib perempuan di Dunia Ketiga. Oleh karena itu, pemerintahan negara Dunia Ketiga secara beramai-ramai dan serentak memasukkan agenda WID ke dalam program pembangunan masing-masing. Hal ini sekaligus merupakan jawaban bagi para feminis yang menganggap bahwa kaum *developmentalism* dalam melaksanakan pembangunan telah mengabaikan perempuan.

Departemen urusan perempuan pun menjadi model hampir di semua negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia (Faqih, 1999).

Untuk menindaklanjuti komitmen PBB dalam melibatkan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, maka pada tahun 1979 disetujuiilah Konvensi penghapusan segala Bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), biasa disingkat CEDAW. Konvensi ini menyerukan persamaan hak dan perlindungan terhadap perempuan dalam empat aspek yaitu: hak dalam bidang hukum, termasuk di dalamnya hak untuk dihapuskannya diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak (pasal 1-6), politik (pasal 7-9), ekonomi (pasal 10-14), sipil atau perdata (pasal 15-16), sedangkan pasal 17 hingga pasal 30 berisi tentang penerapan dan pemberlakuan konvensi bagi negara penandatangan. Konvensi ini diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7/1984. Dalam rangka menindaklanjuti Undang-undang tersebut, maka Menteri Negara Peningkatan Perana Wanita pada tahun 1991 mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Penanganan Perempuan dalam Pembangunan Bangsa di Pusat dan Daerah agar dapat dijadikan arah dalam upaya peningkatan peranan perempuan dalam berbagai sektor kegiatan pembangunan.

Dengan terpinggirkannya perempuan dalam bidang pertanian, maka perempuan merambah sektor non pertanian yang merupakan sektor informal, seperti buruh pabrik di perkotaan, sektor jasa, khususnya pembantu rumah tangga (*domestic services*), dan perdagangan, khususnya perdagangan makanan (*food trade*) (Boserup, 1990). Sektor informal merupakan *bumper* atau katup pengaman perekonomian

masyarakat. Kenyataan ini ditunjukkan oleh adanya kenyataan bahwa sektor informal pada tahun 1999 menampung tenaga kerja 61,99 persen dari seluruh angkatan kerja di Indonesia. Mereka itu merupakan kelompok masyarakat yang tidak terakomodasi dalam sektor formal yang pada umumnya merupakan penduduk miskin atau berpenghasilan rendah dan berpendidikan rendah. Oleh karena itu, sektor ini merupakan sektor yang bersifat fleksibel karena sangat mudah dimasuki oleh siapa pun, tidak membutuhkan pendidikan tinggi, ketrampilan, dan sedikit modal (Evers, 1991; Wirahadikusumah, 1991; Sukamdi, 2000).

Selain itu, sektor informal juga memainkan perananan penting dalam perekonomian Indonesia. Peran penting tersebut dapat dilihat dari kemampuannya menyediakan barang dan jasa yang relatif murah sehingga memungkinkan untuk diakses oleh masyarakat golongan ekonomi rendah. Namun demikian, kenyataan tersebut belum dapat meniadakan pandangan bahwa sektor informal mengganggu keindahan, ketertiban, dan keamanan kota (Tokman dalam Sukamdi, 2002). Hal ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa sektor informal di Indonesia pada tahun 1999 menampung tenaga kerja 61,99 persen dari seluruh angkatan kerja di Indonesia. Dalam struktur pembagian kelas, mereka merupakan kelompok kelas baru yaitu menempati kelas menengah (*middle strata*) menurut kaum *liberal pluralist* dan *developmentalist/modernist*. Sedangkan menurut *neo-Marxist* para aktor yang terlibat pada sektor informal disebut sebagai kelas borjuis kecil (*petty bourgeoisie*) yang terdiri atas majikan kecil (*small employers*) dan pekerja semi otonom (*semi-autonomous workers*) (Wirahadikusumah, 1991). Menurut Sukamdi (2000) para

perempuan yang memasuki sektor informal sebagian terbesar adalah sebagai pedagang kaki lima, seperti berdagang makanan, kerajinan, minuman, dan makanan kecil.

Sedangkan pedagang kaki lima di Simpanglima yang menjadi objek penelitian ini menunjukkan karakteristik yang tidak berbeda dengan berbagai karakteristik hasil penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu, maka penelitian ini difokuskan pada peran produktif mereka dalam memainkan ekonomi keluarga serta implikasi dari peran yang dimainkannya itu bagi posisi tawar mereka terhadap laki-laki (suami) yang ditunjukkan pada berbagai pengambilan keputusan rumah keluarga.